

PERILAKU PEMILIH DALAM MENENTUKAN PILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

Sri Nurhidayati¹, Andi Ferdiansyah^{2*}, Donny Wijaya³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: andif24@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 05 Desember 2025</i> <i>Revised: 15 Desember 2025</i> <i>Published: 31 Desember 2025</i>	
Keywords <i>Pemilihan Umum;</i> <i>Perilaku Pemilih;</i> <i>Demokrasi;</i>	Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat kabupaten merupakan manifestasi penting dari proses demokrasi lokal, di mana partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah menjadi indikator kualitas demokrasi itu sendiri. Penelitian ini mengkaji perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dengan fokus pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana pola perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politik dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan mereka. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perilaku pemilih serta mengidentifikasi faktor determinan yang memengaruhi preferensi politik masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai motivasi, pertimbangan, dan kecenderungan pemilih. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemilih dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya, dari sekitar 81 persen menjadi 72 persen, yang menandakan adanya tantangan serius dalam keterlibatan politik masyarakat. Secara substantif, perilaku pemilih dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor sosiologis, psikologis, emosional, dan pragmatis. Sebagian besar pemilih menunjukkan kecenderungan rasional dengan mempertimbangkan visi-misi, rekam jejak, dan integritas calon. Namun, pengaruh keluarga, tokoh masyarakat, serta kedekatan emosional masih dominan, terutama pada kelompok pemilih dewasa dan lansia. Fenomena politik uang juga ditemukan, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi rendah, meskipun dinilai negatif oleh sebagian besar responden. Di sisi lain, media sosial berperan signifikan dalam membentuk preferensi politik pemilih muda. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan, peningkatan literasi digital, serta praktik kampanye yang etis guna memperkuat kualitas partisipasi politik masyarakat dan mendorong terbentuknya perilaku pemilih yang lebih rasional dan bertanggung jawab.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokratis yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman sosial, budaya, agama, dan geografis yang sangat luas, praktik demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Demokrasi menjadi mekanisme penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam menentukan arah pembangunan nasional maupun daerah. Prinsip kedaulatan rakyat ini tercermin jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Salah satu perwujudan nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pelaksanaan Pilkada secara langsung memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Ketentuan ini dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah sesuai preferensi politiknya. Pilkada tidak hanya menjadi proses untuk menentukan pemimpin daerah, tetapi juga menjadi arena kontestasi politik yang mencerminkan tingkat partisipasi, kesadaran politik, dan kualitas demokrasi masyarakat di tingkat lokal.

Kualitas Pilkada sangat ditentukan oleh perilaku pemilih, karena perilaku politik masyarakat merupakan indikator penting untuk melihat tingkat kedewasaan demokrasi. Dalam konteks Indonesia, perilaku pemilih menunjukkan dinamika yang kompleks dan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoritis, perilaku pemilih dipengaruhi oleh berbagai pendekatan, antara lain pendekatan sosiologis, psikologis, rasional, dan pragmatis. Dalam praktik politik di berbagai daerah, faktor sosiologis seperti ikatan keluarga, hubungan kekerabatan, agama, tradisi budaya, serta pengaruh tokoh masyarakat masih memegang peranan signifikan. Pemilih yang rasional cenderung mempertimbangkan kualitas calon berdasarkan visi-misi, rekam jejak, serta integritas pribadi kandidat. Sementara itu, faktor psikologis muncul dalam bentuk kedekatan emosional, persepsi positif terhadap figur tertentu, maupun loyalitas politik yang terbentuk dari pengalaman pemilu sebelumnya. Fenomena politik uang (money politics) juga masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan Pilkada, khususnya di wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Meskipun sebagian besar pemilih menyadari bahwa politik uang merupakan praktik yang bertentangan dengan nilai demokrasi, dalam kenyataannya masih terdapat masyarakat yang menjadikan imbalan materi sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih tidak semata-mata dibentuk oleh pertimbangan rasional, tetapi juga oleh faktor sosial dan ekonomi. Kemajuan teknologi informasi turut membawa perubahan signifikan terhadap pola perilaku pemilih. Media sosial menjadi sarana kampanye yang semakin dominan, terutama dalam menjangkau pemilih muda. Di satu sisi, media sosial memperluas akses informasi politik dan meningkatkan kesadaran pemilih, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi penyebaran hoaks, disinformasi, dan kampanye negatif yang dapat memengaruhi persepsi pemilih secara tidak objektif. Perubahan ini menjadikan dinamika Pilkada semakin kompleks karena preferensi politik masyarakat tidak hanya dibentuk melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui komunikasi digital.

Dalam konteks Kabupaten Sumbawa, dinamika perilaku pemilih dapat dilihat dari fluktuasi tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa periode Pilkada. Pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih tercatat relatif tinggi dan mencapai sekitar 80 persen. Partisipasi tersebut mengalami sedikit penurunan pada Pilkada Tahun 2020, yang berada pada kisaran 81 persen, meskipun masih tergolong cukup baik. Namun, pada Pilkada Kabupaten

Sumbawa Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga berada pada angka sekitar 72 persen. Penurunan partisipasi ini mengindikasikan adanya perubahan perilaku politik masyarakat, baik dari sisi motivasi memilih, tingkat kepercayaan terhadap proses politik, maupun pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks. Masyarakat Kabupaten Sumbawa dikenal memiliki solidaritas komunal yang kuat, sehingga peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat masih sangat berpengaruh dalam membentuk preferensi politik pemilih. Namun, meningkatnya literasi digital di kalangan generasi muda turut melahirkan pola perilaku politik baru yang lebih kritis, terbuka, dan rasional terhadap isu-isu pembangunan daerah. Perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan pengaruh modern ini menjadikan Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 sebagai fenomena politik yang menarik untuk dikaji secara mendalam.

Dengan demikian, penelitian mengenai perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 menjadi penting untuk mengidentifikasi pola preferensi politik masyarakat, memahami faktor-faktor yang memengaruhinya, serta menjelaskan penurunan tingkat partisipasi pemilih yang terjadi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi perilaku pemilih, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan partisipasi politik masyarakat di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pola perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, motivasi, serta latar belakang sosial dan psikologis yang melandasi keputusan politik masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, wilayah yang memiliki dinamika politik lokal yang cukup kompleks, serta karakteristik sosial dan budaya yang beragam. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada kuatnya pengaruh tokoh masyarakat, struktur sosial tradisional, dan perkembangan penggunaan media sosial yang semakin meningkat di kalangan pemilih muda. Pengumpulan data dilakukan selama periode kampanye hingga pasca pemungutan suara, sehingga peneliti dapat mengamati perilaku pemilih secara langsung pada seluruh tahapan pemilihan.

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Informan mencakup pemilih dari berbagai kelompok usia 3 Pemilih Pemula, tokoh agama 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang, penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan desa, tim sukses, serta pemilih yang aktif mengikuti perkembangan politik melalui media sosial. Variasi informan tersebut memungkinkan penelitian menangkap beragam perspektif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih di Kabupaten Sumbawa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan

dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali motivasi, persepsi, dan pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan politik. Observasi dilakukan pada berbagai aktivitas kampanye, pertemuan politik, dan proses pemungutan suara, sehingga peneliti dapat menangkap fenomena yang terjadi secara langsung, termasuk praktik politik uang, pengaruh tokoh lokal, dinamika kampanye, serta interaksi sosial antarwarga. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data lapangan melalui analisis dokumen resmi, arsip KPU, publikasi media, serta konten media sosial yang berkaitan dengan Pilkada.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari tiga proses yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses reduksi dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah agar lebih mudah dianalisis. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan hubungan antartema dan pola perilaku pemilih. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang telah diverifikasi secara berulang untuk memastikan ketepatannya.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sementara triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan member check dengan meminta beberapa informan meninjau kembali hasil interpretasi data guna memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 disusun berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta telaah dokumen dari lembaga penyelenggara pemilu. Melalui wawancara dengan informan dari berbagai kelompok usia, jenjang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan status sosial, diperoleh gambaran komprehensif mengenai pola perilaku politik masyarakat Sumbawa. Pembahasan ini juga diperkuat oleh perspektif kelembagaan melalui wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa, khususnya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, serta pendapat pengamat politik lokal yang memahami dinamika politik daerah secara mendalam. Dengan demikian, analisis ini mencerminkan perpaduan antara pengalaman empirik masyarakat sebagai pemilih dan pandangan institusional dari penyelenggara pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih pada Pilkada Tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, ekonomi, serta perkembangan teknologi informasi yang semakin memengaruhi proses politik di tingkat lokal. Dalam wawancara yang dilakukan pada 18 Juni 2025, pihak KPU Kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan signifikan dari 81% pada Pilkada sebelumnya menjadi sekitar 72% pada Pilkada 2024. Penurunan ini sejalan dengan tren nasional yang menunjukkan

adanya kelelahan politik (political fatigue) akibat penyelenggaraan Pilkada yang beririsan dengan Pemilu nasional, sehingga masyarakat mengalami kejenuhan dalam menghadapi berbagai kegiatan politik dalam waktu yang bersamaan. Selain faktor tersebut, penurunan partisipasi juga dipengaruhi oleh akurasi daftar pemilih yang masih belum optimal. Banyak pemilih yang terdaftar tidak hadir di TPS karena pindah domisili atau tidak mengetahui informasi terkait keberadaan TPS, sehingga mendorong terjadinya ketidaksesuaian antara daftar pemilih tetap dan pemilih yang benar-benar hadir.

Menariknya, menurunnya praktik politik uang dibandingkan pada kontestasi sebelumnya justru memberikan dampak paradoks terhadap partisipasi pemilih. Bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi terbatas, politik uang telah menjadi hal yang dianggap sebagai “ritual pemilu” yang dikaitkan dengan kesempatan memperoleh keuntungan material. Ketika praktik tersebut berkurang, sebagian pemilih enggan datang ke TPS karena merasa tidak ada manfaat langsung yang mereka peroleh dari proses pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai makna partisipasi politik masih belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran demokratis, tetapi lebih banyak dibentuk oleh pengalaman-pengalaman pragmatis pada pemilu sebelumnya. Selain itu, faktor psikologis berupa kejenuhan dan rendahnya minat terhadap politik juga memengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, KPU Kabupaten Sumbawa menerapkan strategi sosialisasi yang diarahkan secara khusus kepada wilayah-wilayah yang dianggap memiliki partisipasi rendah, daerah rawan konflik, kelompok disabilitas, serta pemilih pemula. Sosialisasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke desa-desa, pertemuan dengan kelompok masyarakat, kegiatan pendidikan pemilih di sekolah, serta pemanfaatan media sosial dan media massa. Pendekatan kombinatorik ini bertujuan menjangkau seluruh segmen pemilih secara lebih luas dan inklusif. Upaya KPU tersebut menunjukkan kesadaran bahwa karakteristik pemilih yang beragam membutuhkan metode penyampaian informasi yang berbeda agar pesan demokrasi dapat tersampaikan secara efektif.

Dinamika perilaku pemilih di Kabupaten Sumbawa juga sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, usia, serta lingkungan sosial budaya. Pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi atau yang memiliki akses terhadap informasi melalui internet dan media sosial cenderung menunjukkan pola perilaku politik yang lebih rasional. Mereka lebih banyak mempertimbangkan visi, misi, dan program kerja calon, serta memperhatikan rekam jejak calon sebelum menentukan pilihan. Sementara itu, pemilih muda khususnya kelompok usia 17–30 tahun lebih responsif terhadap calon yang aktif bersosialisasi melalui platform digital, memiliki gaya komunikasi yang modern, serta menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu kaum muda seperti lapangan pekerjaan, pengembangan kreatif, dan pendidikan. Pola ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki preferensi politik yang lebih fleksibel dan cenderung dipengaruhi oleh interaksi digital, baik melalui kampanye daring maupun viralitas konten media sosial.

Sebaliknya, pemilih dewasa dan lanjut usia lebih dipengaruhi oleh kedekatan emosional,

hubungan kultural, dan pertimbangan tradisional. Mereka lebih menghargai figur calon yang dianggap sebagai sesepuh, tokoh adat, atau pemimpin lokal yang memiliki kedekatan historis dengan masyarakat. Pertimbangan ini sering kali lebih menentukan daripada program kerja atau visi-misi kandidat. Kedekatan sosial dalam bentuk hubungan keluarga, ikatan persaudaraan, kesamaan kampung halaman, serta kedekatan etnis menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap pilihan politik kelompok pemilih ini. Di daerah pedesaan, loyalitas komunal sering kali lebih kuat daripada pertimbangan rasional, sehingga arah dukungan pemilih dapat dipengaruhi oleh tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati.

Selain itu, faktor emosional turut membentuk perilaku pemilih, terutama dalam konteks relasi sosial yang kuat di Kabupaten Sumbawa. Banyak pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan simpati personal, keramahan calon, pengalaman bertemu langsung dengan kandidat, atau persepsi mengenai sikap dan integritas calon. Persepsi ini umumnya dibentuk dari interaksi langsung pada kegiatan kampanye, pengajian, acara adat, serta informasi yang mereka peroleh melalui percakapan sehari-hari. Pemilih yang bersikap emosional cenderung lebih mudah terpengaruh oleh kharisma, gaya komunikasi, dan citra positif calon daripada oleh program kerja yang bersifat teknis.

Faktor pragmatis juga menjadi bagian dari realitas politik yang tidak dapat diabaikan. Meskipun secara etis dan hukum tidak dibenarkan, praktik politik uang masih ditemukan di beberapa wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Politik uang sering dianggap sebagai bentuk “bantuan” atau kompensasi atas partisipasi dalam pemilu. Sebagian pemilih menyatakan bahwa meskipun menyadari bahwa keputusan politik seharusnya tidak didasarkan pada uang, kondisi ekonomi memaksa mereka untuk menerima pemberian tersebut. Fenomena ini mencerminkan bahwa pendidikan politik di tingkat lokal masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memahami hakikat demokrasi sebagai proses penentuan pemimpin secara sadar dan bertanggung jawab, bukan sebagai transaksi material.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perilaku pemilih pada Pilkada Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa keputusan politik masyarakat terbentuk melalui interaksi kompleks antara faktor sosiologis, psikologis, emosional, dan pragmatis. Penurunan tingkat partisipasi pada Pilkada 2024 tidak hanya dipengaruhi oleh kelelahan politik akibat beririsan dengan pemilu nasional, tetapi juga oleh persoalan akurasi daftar pemilih dan melemahnya insentif pragmatis seperti menurunnya praktik politik uang. Dalam konteks ini, pemilih rasional—terutama mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan akses terhadap informasi digital—cenderung memilih berdasarkan kualitas program, visi, misi, dan rekam jejak calon. Sebaliknya, pemilih dewasa dan lanjut usia lebih banyak menentukan pilihan berdasarkan ikatan emosional, kedekatan budaya, serta pengaruh tokoh lokal. Generasi muda menunjukkan kecenderungan politik yang lebih modern dan responsif terhadap kampanye digital, sementara sebagian masyarakat pedesaan masih mengaitkan partisipasi dengan manfaat material sehingga

kehadiran ke TPS menurun ketika politik uang berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai nilai demokrasi belum merata dan masih dipengaruhi oleh pengalaman serta struktur sosial ekonomi masyarakat. Upaya sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sumbawa telah diarahkan pada kelompok rentan, pemilih pemula, serta wilayah dengan partisipasi rendah, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik masyarakat serta efektivitas komunikasi pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi dan menghasilkan pemilih yang lebih rasional, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih kreatif, serta penguatan integritas penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, demokrasi lokal di Kabupaten Sumbawa dapat berkembang menuju proses politik yang lebih inklusif, sadar, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cahyani, A. R. (2025). *Komplektasi Perilaku Politik Pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 pada Aspek Integrasi Tradisi Lokal dan Teknologi*. *Journal of Indonesian Social Studies Education*, 3(1).
- Campbell, A., Converse, P., Miller, W., & Stokes, D. (1960). *The American Voter*. University of Chicago Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis*. Routledge.
- Khumiaro, A. A., & Asfar, M. (2023). *Perilaku Memilih Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020*. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Varma, S. P. (2007). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*, 6(4), 445–488.